

The background of the page is a light gray gradient. Overlaid on this is a large, stylized graphic of musical notation. It consists of several curved, parallel lines that resemble a musical staff, curving from the bottom left towards the top right. On these lines, there are various musical symbols, including stems, beams, and note heads, all rendered in a dark gray or black color. The overall effect is that of a dynamic, flowing musical score.

Jurnal
 **MANDIRI**[™]
ILMU PENGETAHUAN, SENI, DAN TEKNOLOGI

www.jurnalmandiri.com

PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA TANGERANG

Ahmad Nazir

Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang
naziramangkurat@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana mekanisme kerja BKM dalam pembangunan dan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran BKM dalam pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan pada BKM Mekar Sejati Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kel Gondrong, Kec Cipondoh, Kota Tangerang. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif Menurut Kuncoro adalah "Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian". Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan pendekatan terhadap dunia empiris, serta memberikan penjelasan tentang perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme kerja BKM diawali dengan rembuk warga tahunan yang disebut RWT atau musyawarah yang dilakukan oleh pengurus badan kesedayaan masyarakat dengan rukun tetangga, rukun warga yang dihadiri oleh perwakilan dari aparat pemerintah ditingkat kelurahan dan pendamping BKM itu sendiri yang disebut dengan paskel. Disitu para Rt dan Rw mengajukan program-program yang berhubungan dengan pembangunan di wilayah masing-masing seperti pembangunan jalan paving block, pembangunan saluran air dan pembuatan jamban sampai yang belum diusulkan pada Musrenbang kelurahan dan menjalankan program pembangunan yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Peran BKM di masyarakat adalah sebagai roda penggerak masyarakat yang akan mengembangkan modal sosial yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pembangunan dll.

Kata Kunci: BKM dan Pembangunan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi saat ini masyarakat dihadapkan dengan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah persaingan dari sisi aspek ekonomi. Semakin ketatnya persaingan menyadarkan kita betapa pentingnya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal agar dapat

meningkatkan taraf hidup ekonominya. Selain itu pula, tingginya kualitas SDM suatu daerah menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut

Pemerintah Republik Indonesia telah men-canangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta te-

tap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan nasional, harus berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materil dan spiritual, jiwa dan raga serta individu dan masyarakat.

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana konstribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi ada banyak kejadian terutama di negara berkembang, kota-kota tersebut berkembang tanpa pengendalian. Jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya.

Kondisi kota-kota di negara berkembang, semakin hari semakin terpuruk. Meskipun, ada gejala ekonomi kota meningkat, padahal di balik itu tingkat stres warga sangatlah tinggi, jumlah orang yang sakit terus saja bertambah, jumlah penduduk dengankualitas tinggi terus menurun, dan pada akhirnya, kota yang katanya mengalami kemajuan ekonomi itu mengalami kemunduran dalam berbagai hal.

Pembangunan infrastruktur khususnya di perkotaan harus terus menerus dilakukan, hal ini berkaitan dengan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya suatu daerah dengan kondisi infrastrukturnya. Di era modernisasi, dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat perkotaan yang menyangkut berbagai aspek, yang meliputi ekonomi, industri, sosial, budaya dan sebagainya telah mengalami proses transformasi dan perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur perkotaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan Infrastruktur diartikan sebagai segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang keberjalanan kegiatan masyarakat sehingga dapat me-

nekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan prasarana fisik/struktur yang digunakan untuk menopang aktivitas masyarakat. Infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur gedung dan perumahan dan infrastruktur sumber daya air.

Sejak lama, pembangunan infrastruktur didominasi oleh dunia laki-laki. Hal ini terkait pandangan masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur berhubungan dengan pekerjaan kasar, buruh bangunan atau kuli bangunan. Dengan semakin berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia, semakin banyak perempuan yang menggeluti pendidikan tinggi di bidang Arsitektur dan Teknik Sipil, sehingga pandangan masyarakat bergeser dan mulai memahami bahwa suatu bangunan tidak mengalami proses pembangunannya saja, tetapi mulai dari proses perencanaan desain gambar rencana, Rencana Anggaran Biaya, *time schedule*, dan lain sebagainya hingga sampai pada proses pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999)

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan

industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah mencoba melakukan pembangunan tersebut melalui aspirasi dari masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan, hal itu menjadikan masyarakat lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan apa yang telah dibangun oleh pemerintah.

Badan keswadayaan masyarakat (BKM) merupakan suatu organisasi independen yang berada di dalam masyarakat yang mendukung program pemerintah baik pemerintahan pusat maupun dan pemerintahan daerah dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pembangunan daerah.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Kerja BKM dalam pembangunan.
2. Bagaimana peran BKM dalam pembangunan daerah.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana mekanisme kerja BKM dalam pembangunan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran BKM dalam pembangunan daerah.

Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kedua hal tersebut adalah:

Manfaat Teoritis

- 1). Menambah wawasan ilmu pengetahuan sesuai dengan teoritis
- 2). Bahan kajian bagi peneliti lain yang berkaitan dengan Pembangunan

Manfaat Praktis

- 1). Bagi Peneliti
Dapat mengetahui lebih mendalam tentang Peran BKM dalam pembangunan daerah.
- 2). Bagi Pembaca
Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan dijadikan dasar acuan untuk pembuatan karya ilmiah lain di masa yang akan datang.

Kajian Teori

Pengertian BKM/LKM

BKM/LKM adalah singkatan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang merupakan nama "jenerik" atau istilah untuk suatu lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat Kelurahan/Desa. Dengan kalimat lain dapat dikatakan BKM/LKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.

BKM/LKM disamping sebagai dewan pengambilan keputusan juga untuk menggalang potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar (*channeling*), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan. BKM/LKM juga merupakan jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintahan desa/kelurahan serta memperjuangkan kebutuhan warga di tingkat desa/kelurahan dalam musbangdes/kelurahan.

Jadi tidak ada yang diwakili, dalam hal ini semua orang sebagai warga mewakili diri sendiri jadi semua dalam kesetaraan, meskipun mungkin saja kedudukan sehari-hari seorang adalah kepala sekolah, yang lain tukang sapu dinas kebersihan, yang lain lagi tukang pos, guru, direktur suatu perusahaan, dokter, komandan kodim, pendeta, dsb dalam himpunan masyarakat warga berkedudukan mereka setara yaitu sesama warga. Oleh sebab itu masyarakat warga baik secara keseluruhan maupun dalam arti himpunan atau paguyuban warga setempat selalu memiliki kemerdekaan sendiri (*independency*).

BKM / LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga sua-

tu kelurahan yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga. Kolektifitas kepemimpinan ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asuh, saling asah dan saling asih antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat, dan transparansi. Disamping itu pola kepemimpinan kolektif juga merupakan desinsentif bagi para pemimpin yang justru ingin mendapatkan kekuatan absolut di satu tangan yang pada gilirannya akan melahirkan tirani dan anarki yang mementingkan diri sendiri dan ketidakadilan.

Pengertian Himpunan Masyarakat Warga

Masyarakat warga adalah terjemahan dari *civil society*, yaitu himpunan masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri, yang dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar.

Himpunan masyarakat warga atau *civil society* adalah “organisasi masyarakat yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan kemerdekaannya (otonomi) terhadap institusi negara, keluarga, agama dan pasar”.

Civil Society is totally of self initiating and self regulating organizations, peacefully pursuing a common interest, advocating a common cause, or expressing a common passion; respecting the right of others to do the same, and maintaining their relative autonomy vis-à-vis the state, the family, the temple and the market (Saad Eddin Ibrahim, Nurturing Civil Society at the World Bank, Dec 1996)

Secara singkat sering kali masyarakat warga dirumuskan sebagai organisasi-organisasi war-

ga yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat yang posisinya berada diantara keluarga dan negara

Civil society is generally defined as the self initiating and self regulating organizations that are situated between the household and the state

Ciri Utama Masyarakat Warga

Ciri utama suatu masyarakat warga atau *civil society* adalah sebagai berikut:

Adanya kesetaraan, dimana masyarakat terbentuk sebagai himpunan warga yang setara. Tiap anggota atau warga berhimpun secara proaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak, karena adanya ikatan kesamaan (*common bond*) seperti antara lain kepentingan, persoalan, tujuan, dsb.

Tiap anggota atau warga berhimpun secara suka rela dan bukan karena terpaksa karena adanya paksaan : Membangun semangat saling percaya dan Bekerja sama dalam kemitraan

Secara damai memperjuangkan berbagai hal termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan serta pembangunan air minum dan sanitasi, Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi. Menjunjung nilai-nilai demokrasi, dalam konsep musyawarah, dalam setiap keputusan yang diambil. Selalu mempertahankan otonomi atau kemerdekaan dari berbagai pengaruh kepentingan. Mampu bekerja secara mandiri

Posisi Masyarakat Warga

Secara tegas dapat dikatakan bahwa masyarakat warga ini adalah himpunan warga yang posisinya :

- di luar institusi pemerintah
- di luar institusi militer
- di luar institusi agama
- di luar institusi pekerjaan atau usaha
- di luar institusi keluarga

Dengan demikian BKM/LKM merupakan alternatif pilihan bagi warga masyarakat sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karenanya BKM/LKM sebagai dewan pimpinan kolektif adalah milik seluruh penduduk kelurahan yang bersangkutan.

Peran, Fungsi dan Tugas BKM

Peran BKM di masyarakat adalah “sebagai roda penggerak masyarakat yang akan mengembangkan modal sosial yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi”. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan di penuhi kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan bagi masyarakat miskin.

Fungsi BKM

1. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat.
2. Pusat Pengembangan aturan.
3. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan.
4. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, utamanya penanggulangan kemiskinan.
5. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat.
6. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat desa.
7. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah ataupun pihak ketiga (*chanelling*).

Tugas Pokok BKM

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, termasuk penggunaan dana BLM program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
2. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan misi, visi, rencana strategis dan rencana program penanggulangan kemiskinan (pronangkis).

3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM, termasuk penggunaan dana program pemberdayaan masyarakat di penanggulan kemiskinan di wilayahnya.
4. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalan ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.
5. Memperivikasi penilaian yang telah dilakukan oleh unit-unit pelaksanaan dan memutuskan proposal mana yang diprioritaskan didanai oleh dana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya atau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar kriteria dan prosedur yang di sepakati dan di tetapkan bersama.
6. Memonitor, mengawasi dan memberikan masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunannya di pedesaan.
7. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis.
8. Membangun transparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar umumnya, melalui berbagai media, seperti pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka dan lainnya.
9. Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui aditor external/independen serta menyebar luaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
10. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan di hadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggung jawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil kepada masyarakat.
11. Membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan, dan keuangan yang di bawah kendali BKM.

12. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah kelurahan setempat, untuk dapat di komunikasikan, di koordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
13. Mengawal penerapan nilai-nilai dasar dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pembangunan.
14. Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan atau pembangunan pedesaan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).
15. Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas lingkungan serta pemukiman yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat.
16. Memfasilitasi *net working* (jejaring) kerjasama dengan berbagai potensi sumber daya yang ada sumber-sumber luar masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan BKM Kota Tangrang, maka dibentuk unit-unit pengelola kegiatan yang terdiri dari :

- 1 orang Sekretariat
- 3 orang UPL (Unit Pengelola Lingkungan)
- 2 orang UPS (Unit Pengelola Sosial)
- 3 Orang UPK (Unit Pengelola Keuangan)

Peran dan Fungsi UPL

Sebagai Unit Pengelola Lingkungan yang bertugas mengelola kegiatan di bidang pembangunan lingkungan perumahan dan pemukiman, yang bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan lingkungan, pemeliharaan dan perbaikan sarana lingkungan, sebagai motor penggerak dalam rangka membangun kepedulian bersama dalam menata lingkungan yang lestari dan sehat.

Peran dan Fungsi UPK

Unit Pengelola Keuangan bertugas untuk mengelola dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangan, baik yang berasal dari bantuan stimulan BLM PNPM maupun dari pihak-pihak lain seperti pemerintah, swasta, pihak ketiga yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat miskin di Pedesaan

Peran dan Fungsi UPS

Unit Pengelola Sosial bertugas untuk mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan bertindak sebagai motor penggerak dalam rangka membangun kepedulian bersama dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat berupa peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, lansia/jompo dan juga memberikan santunan untuk mengatasi anak putus sekolah melalui pemberian beasiswa, pemberian santunan anak yatim, serta beberapa pelatihan keterampilan, dan perbaikan rumah tidak layak huni .

Semua pengelola ini tidak boleh di rangkap oleh anggota BKM. Semua perangkat tersebut berperan menjalankan kebijakan/keputusan yang ditetapkan oleh BKM dan mereka adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, memiliki nilai-nilai kemanusiaan serta memiliki keahlian di bidang yang bersangkutan.

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

Semua perangkat ini dibentuk oleh BKM dan orang-orang yang duduk dalam unit pengelola adalah mereka yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin dan memiliki nilai kerelawanan, kejujuran serta memiliki kemampuan dan waktu luang.

Pengertian Pembangunan

Di kehidupan sehari-hari, istilah pembangunan sangat sering digunakan dalam berbagai bidang. Pembangunan selalu dikait-kaitkan dengan bidang ekonomi, bidang politik, mental, tata negara, dan bisang-bidang lainnya. Istilah ini sering kali dikait-kaitkan dengan perubahan ke arah yang lebih baik ataupun perubahan hal-hal lama ke berbagai hal baru.

Kegiatan pembangunan mutlak perlu dilaksanakan demi terciptanya kehidupan yang

lebih baik dan juga untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Setiap orang tidak dapat terlepas dari kata pembangunan. Semuanya wajib melaksanakan pembangunan demi bertahan dalam menjalani kehidupan.

Lantas apa sih sebenarnya pembangunan itu? Secara singkatnya, pembangunan dapat diartikan “sebagai setiap kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik”. Selain dari definisi di atas, ada banyak sekali definisi dari kata pembangunan yang diungkapkan oleh para ahli.

Ada banyak sekali pendapat para pakar mengenai definisi pembangunan. Beberapa di antara pendapat tersebut yaitu :

Menurut Mohamma Ali, “pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.”

Menurut Seers, “pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial.”

Menurut Inayatullah, “pembangunan merupakan kegiatan perubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri.”

Menurut Rogers dan Shoemaker, pengertian pembangunan adalah “suatu jenis perubahan sosial, yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah.”

Menurut Benny H. Hoed, “pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari keteringgalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.”

Menurut Dissaynake, “pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.”

Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional

Hakikat Pembangunan dan UUD 1945

Pembangunan hakikatnya adalah “upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: “mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.”

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat; tingkat agregat-nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa-kalurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi sampai nasional; dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan

berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut: (1) secara politik: demokrasi telah berjalan; (2) secara sosial: terjadi peran serta aktif masyarakat; (3) secara ekonomi: mekanisme pasar berperan (*market work-mechanism*); (4) secara hukum: berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*); dan (5) secara administrasi publik: pembangunan dikelola secara baik (*good governed*, terjadi *good governance* dan *good government*).

Sementara itu pada negara yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, maka pembangunan belum dapat sepenuhnya berlangsung sesuai harapan tersebut di atas. Pemerintah sebagai penggerak pembangunan berfungsi membantu rakyat untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berarti: memihak, mempersiapkan dan melindungi (*empowerment*).

Landasan Penyelenggaraan Pembangunan

Pembangunan di Indonesiasesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang multidimensi. Dalam system ketatanegaraan di Indonesia dikenal tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara, meliputi: Indonesia adalah negara hukum; sistem konstitusional; kekuasaan tertinggi dijalankan oleh MPR; presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR; presiden tidak bertanggung-jawab kepada DPR; menteri negara adalah pembantu presiden; dan kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kelembagaan penyelenggara negara di Indonesia didasarkan pada tujuh kunci pokok itu.

Kelembagaan penyelenggaran negara (dikenal sebagai sistem administrasi Negara Indonesia) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengorganisasikan tugas-tugas pembangunan. Dalam rangka pengorganisasian tugas-tugas pembangunan maka sesungguhnya peran pemerintah adalah membantu pelaksanaan pembangunan dengan peran utama: (1) membantu mengelola potensi nasional dan global sebagai sumber pembangunan nasional; (2) membantu

merumuskan alokasi sumberdaya untuk penyelenggaraan pembangunan nasional; dan (3) mendampingi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional maka sejak awal tahun 2000 telah disepakati secara nasional adanya landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut: *Pertama*, landasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945. UUD 1945 merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam Keputusan/Ketetapan MPR. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi. *Kedua*, landasan idiil pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan yang paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka memperkokoh perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD 1945 guna dijadikan menjiwai penyusunan Keputusan/Ketetapan MPR. *Ketiga*, landasan operasional pembangunan adalah Keputusan/Ketetapan MPR. Keputusan/Ketetapan MPR terutama Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan nasional-lima tahunan. GBHN disusun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN adalah UUD 1945. *Keempat*, landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan Nasional-lima tahunan (Propenas). Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Dari 104 BKM yang terdapat di kota Tangerang, diantaranya adalah BKM Mekar

Sejati yang berada di kelurahan Gondrong dan BKM Mekar Sejati tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian.

BKM Mekar Sejati Kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro Kel Gondrong Kec Cipondoh Kota Tangerang No. Telepon : 081218566383

Waktu Penelitian

Agar waktu yang digunakan dalam penelitian ini efisien dan tepat, perlu kiranya peneliti membuat tabel rencana penelitian dengan perkiraan waktu mulai dari bulan Juli-Desember 2017 atau 6 bulan, adapun rencana kerja penelitian ini sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	BULAN																							
		JULI			AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	√																							
2	Pembuatan Proposal		√	√	√	√																			
3	Proposal						√	√																	
4	Pengumpulan Data								√	√	√	√	√	√	√										
6	Analisis Data															√	√	√	√						
7	Penyusunan Laporan																			√	√	√			
8	Revisi/pelaporan																						√	√	

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Deskriptif Menurut Kuncoro adalah “Penelitian deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian”, karena dalam penelitian ini dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan program Bappeda Kota Tangerang dan masyarakat yang terlibat dalam Perencanaan Pembangunan pada BKM di Kota Tangerang.

Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan pendekatan terhadap dunia empiris, serta memberikan penjelasan tentang perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Tangerang, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran BKM Mekar Sejati di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Ungkapan kualitatif merujuk pada ungkapan yang luas terhadap penelitian yang menghasilkan deskriptif, yaitu “berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang dapat di observasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada.”

Desain Penelitian

Metode yang digunakan peneliti adalah

metode deskriptif yaitu menggambarkan serta menganalisa data yang dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif ini karena dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang BKM Mekar Sejati di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang

A. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka, yaitu “dengan membaca dan mencari buku-buku yang berhubungan dengan Analisis kebijakan, serta dokumenter, yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia pada kantor Bappeda KotaTangerang.” Studi pustaka ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah yang muncul dari penelitian dengan menggunakan data-data yang saling berhubungan dengan BKM Mekar Sejati di kelurahan Gondrong Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung pada Dinas Perkim yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui dan mencari data yang akurat tentang BKM Mekar Sejati di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota

Tangerang yang berkaitan dengan pembangunan daerah dengan beberapa kegiatan:

- a) Observasion partisipan yaitu peneliti turun dan melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat gejala-gejala yang diteliti berhubungan dengan pelaksanaan BKM Mekar Sejati tahun 2017.
- b) Wawancara, melakukantanya jawab dengan nara sumber yang mengetahui dan memahami lebih jauh khususnya mengenai Pelaksanaan BKM Mekar Sejati Kel Gondrong, Kec Cipondoh di Kota Tangerang.
- c) *Internet searching*, yaitu peneliti mencari informasi-informasi mengenai pelaksanaan BKM Mekar Sejati, Kel Gondrong, Kec Cipondoh, Kota Tangerang dengan mengaksesnya melalui media elektronik.

B. Teknik Penentuan Informan

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Penentuan informan dalam peneliti ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang memahami Peran BKM dalam Pembangunan Kota Tangerang.

Melalui informan ini peneliti bisa mengetahui keberlangsungan Peran BKM dalam Pembangunan di kota Tangerang, sesuai dengan keterangan di atas, bahwa informan yang dimaksud adalah pejabat Kelurahan, Komisioner/anggota BKM dan penerima manfaat dalam pembangunan itu sendiri serta ketua RW dan RT yang ada di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

1. Komisioner/anggota BKM
2. Staf Kelurahan Gondrong
3. RW
4. RT
5. Warga Kelurahan Gondrong yang menerima manfaat pembangunan

C. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisa data dari berbagai sumber tentang Peran BKM dalam Pembangunan di Kota Tangerang.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. Penelitian kualitatif tidak hanya mengumpulkan data, tetapi merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengumpulan data-data mengenai pelaksanaan Peran BKM dalam Pembangunan Kota Tangerang.

Ungkapan kualitatif merujuk pada ungkapan yang luas terhadap penelitian yang menghasilkan deskripsi, yaitu berupa kata-kata dan perilaku orang-orang yang dapat diobservasi baik lisan maupun tulisan secara faktual, menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada.

Penyajian data yang telah disusun berdasarkan data dan hasil wawancara, observasi, serta tinjauan pustaka yang berhubungan dengan Peran BKM dalam Pembangunan Kota Tangerang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BKM Kota Tangerang dalam Pembangunan

Perubahan paradigma pemerintahan membuat masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga boleh dibilang berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan tergantung pada peran aktif masyarakat. Sehingga tidak heran, bila mulai banyak program pembangunan yang melibatkan sektor swasta ataupun unsur masyarakat di dalamnya. Seperti dilakukan oleh Pemkot Tangerang yang telah melibatkan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai representasi masyarakat dalam program Tangerang Berbenah. Salah satu kegiatan pembangunan yang dikerjakan adalah terkait pembangunan drainase atau saluran air.

Sejalan dengan misi Pemkot untuk melibatkan BKM dalam pembangunan, Pemkot Tangerang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Sosialisasi Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman oleh Kelompok Masyarakat (Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota BKM terkait

pengembangan drainase di Kota Tangerang. "Pengembangan sistem drainase dimaksudkan sebagai upaya mengatasi banjir dan genangan terjadi di beberapa wilayah Kota Tangerang." ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang H Dadi Budaeri dalam sambutannya pada Sosialisasi Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman oleh Kelompok Masyarakat (BKM) di Ruang Rapat Akhlaqlkarimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (30/8).

Pada sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan 104 BKM se-kota Tangerang tersebut, Sekda mengatakan, bahwa seluruh unsur masyarakat dapat turut serta terlibat dalam proses pembangunan yang ada di kota Tangerang. "Setiap unsur masyarakat yang ada di Kota Tangerang dapat ikut berkontribusi dalam proses pembangunan di kota Tangerang, sehingga bisa merasa untuk memiliki dan mau memelihara hasil pembangunan," lanjut Sekda.

Menurut Sekda, bahwa berbagai kelompok swadaya masyarakat yang ada, baik yang ada di kelurahan maupun kecamatan berperan dalam pembangunan di Kota Tangerang. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan.

"Dukungan kelompok keswadayaan dapat mempercepat proses pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan tersebut tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat," tambah Sekda.

Pada kesempatan itu, Sekda meminta agar aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan dapat ikut membantu mendampingi program pembangunan di Kota Tangerang.

"Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan agar ikut membantu mendampingi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga melakukan pengawasan di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini," tutup Sekda. (Suyono).

Tangerang - Perubahan paradigma pemerintahan membuat masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan. Sehingga, boleh dibilang berhasil tidaknya suatu program pembangunan tergantung pada peran aktif masyarakat.

Tidak heran, mulai banyak program pembangunan yang melibatkan sektor swasta atau-

pun unsur masyarakat di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang yang melibatkan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai representasi masyarakat dalam program Tangerang Berbenah, di mana salah satu proyek yang dikerjakan adalah pembangunan drainase atau saluran air.

Sejalan dengan misi pemkot untuk melibatkan BKM dalam pembangunan, digelar Sosialisasi Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman bagi 104 BKM yang tujuannya meningkatkan kompetensi anggota BKM terkait pengembangan drainase di Kota Tangerang. "Pengembangan sistem drainase dimaksudkan sebagai upaya mengatasi banjir dan genangan terjadi di beberapa wilayah Kota Tangerang." ujar Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri, di ruang rapat Akhlaql Karimah, Puspemkot Tangerang, Rabu (30/8).

Sekda mengatakan, seluruh unsur masyarakat dapat turut serta terlibat dalam proses pembangunan yang ada di kota Tangerang.

"Setiap unsur masyarakat yang ada di Kota Tangerang dapat ikut berkontribusi dalam proses pembangunan, sehingga bisa merasa untuk memiliki dan mau memelihara hasil pembangunan," terang Dadi. Ia menambahkan, berbagai kelompok swadaya masyarakat yang ada, baik yang ada di kelurahan maupun kecamatan berperan dalam pembangunan di Kota Tangerang, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. "Dukungan kelompok keswadayaan dapat mempercepat proses pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, pembangunan tersebut tepat waktu, tepat sasaran dan tepat manfaat," jelasnya.

Sekda juga meminta agar aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan dapat ikut membantu mendampingi program pembangunan. "Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan agar ikut membantu mendampingi mulai dari pelaksanaan, hingga melakukan pengawasan di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan," papar Dadi.

Diinformasikan, melalui program Tangerang Berbenah. Pemkot Tangerang telah berhasil membangun 79,436 meter saluran air, 109,625 jalan lingkungan, dan membedah

14.05 unit rumah pada tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2.314 unit rumah. (Humas Pemkot Tangerang)

Profil BKM Mekar Sejati

Nama Lembaga : BKM Mekar Sejati
 Alamat Lengkap : Jl. Ki Hajar Dewantoro Rt. 08/04, Kel Gondrong Kec Cipondoh, Kota Tangerang Banten
 No Telp / Hp : 081218566383
 No Rek BRI : 0818-01-039269-53-7
 Ketua : H. Sariyanto
 Anggota : Ahmad Nazir, Halimi, Abdul Rosyid Zulkifli Mansyur, Muklis, Warisman Sahrudin, Zarkasih
 UPL : H Adi Sucipto, Husin
 UPK : Sapinatunnajah, Sumiyati
 Periode : 2014-2017
 Notaris : Yulita Roestam, SH
 No : 276/ Waarrk/ IV/ 2014-tanggal 28 April 2018

Mekanisme Kerja BKM

Secara umum mekanisme kerja BKM diawali dengan rembuk warga tahunan yang disebut RWT atau musyawarah yang dilakukan oleh pengurus badan kesedayaan masyarakat dengan rukun tetangga, rukun warga yang dihadiri oleh perwakilan dari aparat pemerintah ditingkat kelurahan dan pendamping BKM itu sendiri yang disebut dengan paskel.

Disitu para Rt dan Rw mengajukan program-program yang berhubungan dengan pembangunan di wilayah masing-masing seperti pembangunan jalan *paving block*, pembangunan saluran air dan pembuatan jamban sampai renovasi rumah yang tidak layak huni. Sehingga BKM dapat menginventarisir pembangunan yang ada di wilayah kelurahan yang menjadi acuan program kerja BKM yang akan dijadikan rencana program jangka panjang atau RPJP atau rencana program jangka menengah atau RPJM atau rencana program jangka pendek atau RPJP.

Rencana program jangka panjang atau RPJP menjadi acua program kerja BKM dalam satu priode kepengurusan. Satu prode kepengurusan BKM Mekar Sejati Kelurahan Gondrong 3 tahun. Rencana program jangka menengah atau RPJM menjadi acuan program BKM dalam satu

tahun yang mana hasil penurunan dari rencana program jangka panjang yang akan dilakukan di tahun sekarang. Rencana program jangka pendek atau RPJP menjadi acuan program yang akan dikerjakan oleh BKM dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat atau KSM di wilayah Rt atau Rw setempat dibawah pengawasan unit pengelola lapangan UPL.

Baik rencana program jangka panjang, rencana program jangka menengah dan rencana program jangka pendek dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana pisik lingkungan terbatas hanya sebagai penyusun usulan dan pengawas pada saat pelaksanaan, sedangkan pemilihan dan penentuan rekanan pelaksana dilakukan oleh dinas terkait Pemerintah Kota Tangerang. Optimalisasi penggunaan anggaran tersebut dapat meningkat jika pengelolaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dibawah pengendalian KSM dan BKM.

Peran BKM Dalam Pembangunan

Peran BKM di masyarakat adalah sebagai roda penggerak masyarakat yang akan mengembangkan modal sosial yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan diwilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi, dan sarana prasarana dasar lingkungan (perbaikan jalan lingkungan/*paving block*, saluran air/drainase, jamban dan renovasi rumah tidak layak huni) bagi masyarakat miskin.

Senada dengan yang dikatakan oleh Inayatullah, pembangunan merupakan kegiatan perubahan menuju ke pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membuat sekelompok masyarakat memiliki kendali yang lebih besar terhadap kondisi lingkungan dan juga tujuan politiknya, serta membuat warganya menjadi lebih memiliki kontrol terhadap kehidupan diri sendiri.

Begitu juga apa yang dikatakan oleh H. Sariyanto sebagai ketua BKM Mekar Sejati mengatakan Bahwa: “ BKM hadir ditengah masyarakat berupaya untuk menyadarkan

masyarakat dalam berpikir serta bertindak bahwa pembangunan yang seutuhnya adalah bukan hanya pembangunan secara fisik saja akan tetapi membangun mental dan pola pikir masyarakat juga dikatakan sebagai pembangunan.”

Oleh karena itu salah satu pembangunan yang dilakukan oleh BKM Mekar Sejati dalam upaya membangun kesadaran masyarakat dalam berpikir serta bertindak dilakukannya pelatihan setiap satu tahun sekali. Adapun pelatihan tersebut melibatkan rw, rw, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat se-kelurahan Gondrong.

Dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik lingkungan terbatas hanya sebagai penyusun usulan dan pengawas pada saat pelaksanaan, sedangkan pemilihan dan penentuan rekanan pelaksana dilakukan oleh dinas terkait Pemerintah Kota Tangerang. Optimalisasi penggunaan anggaran tersebut dapat meningkat jika pengelolaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dibawah pengendalian KSM dan BKM. Sistem swakelola juga berpotensi meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat membiayai pembangunan lingkungan dan meningkatkan prinsip transparansi dan akutabilitas pengelolaan anggaran. Sistem pemilihan dan pengangkatan pengurus BKM dilakukan dengan prinsip sukarela dan musyawarah mufakat. Dengan sistem seperti itu sulit diharapkan dapat menarik orang profesional untuk masuk dalam struktur pengurus BKM. Sementara itu disatu sisi pengelola kegiatan BKM mempunyai tanggung jawab yang besar baik dalam pengelolaan anggaran maupun tuntutan terhadap keberhasilan program pemberdayaan.

NO	URAIAN PEMBANGUNAN	VOLUME	SUMBER DANA	TAHUN
1.	Drainase/ Saluran Air	2 Lokasi	APBN, Swadaya	2014
2.	Paving Block/Perbaikan Jalan Lingkungan	2 Lokasi	APBN, Swadaya	2014
3.	Drainase/Saluran Air	1 Lokasi	APBD, Swadaya	2015
4.	Pembuatan Jamban	2 Lokasi	APBD, Swadaya	2015
5.	Paving Block/Perbaikan Jalan Lingkungan	2 Lokasi	APBN, Swadaya	2015
6.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	7 Rumah	APBD, Swadaya	2015
7.	Drainase/Saluran Air	2 Lokasi	APBD, Swadaya	2016
8.	Pembuatan Jamban	4 Lokasi	APBD, Swadaya	2016
9.	Paving Block/Perbaikan Jalan Lingkungan	2 Lokasi	APBD, Swadaya	2016

10.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	11 Rumah	APBD, Swadaya	2016
11.	Drainase/Saluran Air	1 Lokasi	APBD, Swadaya	2017
12.	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	22 Rumah	APBD, Swadaya	2017

Sumber: BKM Mekar Sejati

Tabel diatas menunjukkan bahwa BKM Mekar Sejati sudah berupaya dan melaksanakan pembangunan pada satu priode kepengurusan, yaitu pembangunan drainase/saluran air sebanyak 6 lokasi, yang terdiri dari tahun 2014 sebanyak 2 lokasi yaitu di Rt 01/06 dan Rt 01/04, tahun 2015 sebanyak 1 lokasi yaitu di Rt 08/04 tahun 2016 sebanyak 2 lokasi yaitu di Rt 01/02, Rt 01/06 dan tahun 2017 sebanyak 1 lokasi Rt 02/04. *Paving Block*/perbaikan jalan lingkungan sebanyak 6 lokasi, yang terdiri dari tahun 2014 sebanyak 2 lokasi yaitu Rt 04/02 dan Rt 02/04, tahun 2015 sebanyak 2 lokasi yaitu Rt 05/01 dan 03/03 dan tahun 2016 sebanyak 2 Rt 01/05 dan 04/04 lokasi.

Pembangunan drainase/saluran air dan *paving block*/perbaikan jalan lingkungan diserahkan kepada BKM oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat merasa memiliki fasilitas tersebut, karena ketika masyarakat sudah merasa memiliki nantinya masyarakat akan dapat menjaganya dengan baik.

Senada dengan yang dikatakan oleh Husi sebagai UPL bahwa: “dalam pembangunan saluran air dan perbaikan jalan lingkungan melibatkan masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dapat menjaga pasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah”.

Oleh karena itu, sebelum pembangunan Saluran air/drainase dan perbaikan jalan lingkungan/*paving bock* BKM terlebih dahulu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nama KSM yang diusulkan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakter masing-masing, seperti cirri khusus di wilayah Rt/Rw yang bertepatan dalam melaksanakan pembangunan, agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan melibatkan kelompok masyarakat yang akan bertanggungjawab di lingkungannya dengan diawasi oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

Sedangkan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban dilaksanakan melalui program Tangerang Bebenah yang mana program tersebut dikerjakan oleh Dinas Perkim (Perumahan, Ka-

wasan, Permukiman) melalui BKM. BKM bertanggungjawab dalam pengerjaan renovasi rumah tidak layak huni dan jamban yang dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Hubungan BKM dengan Pemerintah

Salah satu pihak yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat ialah Kepala Kelurahan atau biasa kita sebut Lurah. Pada prosesnya peran serta dari Pihak Kelurahan sangat diperlukan, mulai dari Kantor Lurah yang biasa digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan, keikutsertaan aparat kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan hingga peran serta Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di masyarakat.

Hubungan yang erat terjadi antara BKM "Mekar Sejati" dan Kepala Kelurahan Gondrong bukan serta merta terjadi dengan mudah dan tanpa rintangan. Salah satu poin yang sangat penting dari eratnya hubungan ini ialah antusias dari anggota BKM "Mekar Sejati", yaitu dimana hampir keseluruhan dari Anggota BKM "Mekar Sejati" menyempatkan hadir dalam setiap kegiatan, juga dari Pihak Kelurahan selalu sedia menyempatkan waktu untuk dapat hadir dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Gondrong.

Menurut Hendri Kasie Ekbang Kelurahan Gondrong mengatakan bahwa: "untuk memperlancar dan mendukung tugas kasie ekonomi pembangunan di wilayah kelurahan gondrong BKM Mekar sejati sudah seharusnya harus sering-sering berkoordinasi dengan Kasie Ekbang, agar rencana pembangunan berjalan dengan lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik."

Oleh karna itu sampai sekarang masyarakat dan pihak Kelurahan Gondrong selalu bersenergi dalam setiap kegiatan dikelurahannya, sehingga nampak tidak ada pembatas diantara mereka. Mereka saling bahu membahu dalam membangun kelurahan dan, tidak ada yang lebih ditinggikan dan direndahkan dalam tatanan kehidupan sehingga terjalin rasa kekeluargaan dan saling menghormati antara satu dengan yang lain.

Koordinasi yang dilakukan oleh BKM Mekar sejati tidak terputus sampai di tingkat kelurahan saja, akan tetapi koordinasi dan hubungan yang baik juga dilakukan di Peme-

rintahan Kecamatan Cipondoh terutama Kasie Ekonomi dan Pembangunan yang sering kali BKM Mekar Sejati berkoordinasi dengan pihak kecamatan Cipondoh. Akan tetapi tidak hanya ditingkat kecamatan koordinasi yang dilakukannya hingga ke tingkat Pemerintahan Kota Tangerang yaitu ke Dinas Perkim

Menurut H. Saiyanto Ketua BKM Mekar Sejati bahwa: "ketika BKM malas berkoordinasi dengan pemerintahan dengan sendirinya BKM itu sendiri yang akan rugi, karena usulan pembangunan yang dilakukan di wilayah BKM akan ditentukan oleh Pemerintah setempat."

Jadi ketika BKM malas berkoordinasi dengan pemerintah yang rugi bukan hanya BKM itu sendiri akan tetapi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebutpun akan rugi.

Oleh karena itu jika ketua BKM berhalangan hadir pada pertemuan rapat yang dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Cipondoh ataupun Pemerintahan Kota Tangerang, ketua mendelegasikan kepada pengurus yang lain yang dapat menghadirinya dan yang berkompeten, agar usulan-usulan BKM dapat ditetapkan oleh pemerintah.

Hambatan yang dialami oleh BKM Mekar Sejati

Walaupun seyogyanya BKM Mekar sejati sudah berjalan dengan baik dalam menjalankan program pemerintah, masih saja terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan itu diantaranya adalah hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa hubungan koordinasi sesama anggota BKM Mekar Sejati yang kurang kompak dan kurang harmonis dalam melaksanakan program tersebut, tidak cukup sampai disitu hubungan BKM Mekar Sejati dengan KSM pun terkadang masih terasa belum berjalan secara baik juga.

Hubungan sesama anggota BKM dan hubungan BKM dengan KSM kurang baik disebabkan oleh pemahaman yang berbeda di dalam menanggapi dan menyelesaikan suatu masalah walaupun pada akhirnya dapat terselesaikan juga, dan ini menjadi hambatan atau memperlambat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja BKM, karena setiap pekerjaan BKM harus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerinbtah setempat.

Adapun hambatan eksternal yang dihadapi

oleh BKM Mekar Sejati diantaranya adalah terlambatnya dalam pencairan anggaran baik yang bersumber dari APBN dan APBD, dan Rt serta masyarakat yang wilayahnya kebetulan akan dilaksanakan pembangunan kurang mendukung sepenuhnya dikarenakan ketidakpahaman bagaimana pola kerja BKM yang sebenarnya.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Secara umum mekanisme kerja BKM diawali dengan rembuk warga tahunan yang disebut RWT atau musyawarah yang dilakukan oleh pengurus badan kesedayaan masyarakat dengan rukun tetangga, rukun warga yang dihadiri oleh perwakilan dari aparatur pemerintahan ditingkat kelurahan dan pendamping BKM itu sendiri yang disebut dengan paskel. Disitu para Rt dan Rw mengajukan program-program yang berhubungan dengan pembangunan di wilayah masing-masing seperti pambangunan jalan *paving block*, pambangunan saluran air dan pembuatan jamban sampai renovasi rumah yang tidak layak huni yang belum diusulkan pada Musrenbang kelurahan dan menjalankan program pembangunan yang sudah disahkan oleh pemerintah melalui dinas terkait.
2. Peran BKM di masyarakat adalah sebagai roda penggerak masyarakat yang akan mengembangkan modal sosial yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Sebagai wadah aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan memperjuangkan dipenuhinya kebutuhan dasar, sosial, ekonomi dan sarana prasarana dasar lingkungan (perbaikan jalan lingkungan/*paving block*, saluran air/drainase, jamban dan renovasi rumah tidak layak huni) bagi masyarakat miskin.

Saran

Adapun saran dalam yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Seharusnya Pemerintahan Daerah memfasilitasi semua urusan BKM agar berjalan sesuai dengan harapan semua lapisan masyarakat.
2. Karena BKM dituntut bekerja dengan profesional, akuntabilitas, oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberikan anggaran operasional kepada seluruh anggota BKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *“Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan”*. Depok: FISIP UI Press
- Ahmad Shukri Md Nain. 2003. *“Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan”*. Malaysia: Universitas Teknologi Malaysia
- Coyen, Diana. 1999. *“Perencanaan Sosial Dunia Ketiga”*. Yogyakarta: UGM Press
- Hayati, dkk. 2006. *“Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi untuk SMP dan MTs Kelas VIII 2”*. Jakarta: Erlangga.
- Kartini, Kartono. 1996. *“Pengantar Metodologi Riset Sosial”*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Mulyono, Widjajanti. 2016. *“Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2007. *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*. Gajah mada University Press. Yogyakarta
- Nazir Moh.2014. *“Metode Penelitian”*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Nes, Marnia. 2008. *“Seri Siklus PNPM-Mandiri Perkotaan Panduan Pengembangan BKM”*. Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum
- Rustiadi, dkk. 2011. *“Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Slamet, Y. 1994. *“Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi”*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *“Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan”*. Yogyakarta: Gava Media
- Tim Penyusun. *“Petunjuk Teknis Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat/*

- Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM)*". Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum
- Tim Penyusun. "*Petunjuk Teknis Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan*". Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum.
- Todara, M dan Smith, S. 2011. "*Pembangunan Ekonomi*". Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm: 19.
- Wicaksono, Andri. 2016. "*Konsep Dasar IPS*". Yogyakarta: Penerbit Garudhawacahlm: 347-349
- Zulkarimen Nasution, 2007. "*Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*". Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.